



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 10393-10400

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Krisis Lingkungan, Legitimasi, dan Implementasi ESG di Sektor Sumber Daya Alam

Sunarto¹, Tasya Aspiranti², A. Harits Nu'man³, Sri Suwarsi⁴, Lukman Priyandono⁵

^{1,5}Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

^{2,3,4}Manajemen, Ekonomi dan- Bisnis, UNISBA

sunarto.untag@gmail.com, asya@unisba.ac.id, aharits@unisba.ac.id, sri.suwarsi@unisba.ac.id,
lukman.priyandono@gmail.com

Abstrak

Krisis lingkungan akibat banjir dan longsor besar di Sumatra yang menewaskan lebih dari 1.000 jiwa telah memicu perubahan fundamental dalam tata kelola sektor sumber daya alam di Indonesia. Kebijakan tegas pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan pelanggar regulasi menandai pergeseran paradigma menuju orientasi keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mengenai dinamika respons multi-aktor, proses pemulihan legitimasi organisasi melalui social license to operate, serta integrasi prinsip Environmental, Social, Governance (ESG). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif interpretif dengan metode studi kasus eksploratif, data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap empat responden kunci dan analisis data sekunder dari periode tahun 2022 hingga 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis ini memicu tekanan regulasi yang kuat, memunculkan legitimacy gap yang menurunkan legitimasi sosial perusahaan, serta mendorong transformasi model bisnis industri berbasis ekstraktif. Integrasi aspek ESG terbukti esensial berfungsi sebagai alat mitigasi risiko yang efektif, meningkatkan keunggulan kompetitif, serta memulihkan kembali kepercayaan para pemangku kepentingan. Melalui perspektif manajemen strategis syariah, krisis ini menegaskan pentingnya implementasi nilai keadilan ('adl), amanah, dan kemaslahatan secara nyata dalam aktivitas bisnis. Kesimpulannya, krisis lingkungan bukan sekadar ancaman operasional, melainkan menjadi titik balik strategis bagi organisasi untuk melakukan transformasi total menuju praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, inklusif, dan beretika.

Kata kunci: Krisis Lingkungan, ESG, Legitimasi Organisasi, Keberlanjutan, Perspektif Syariah

1. Latar Belakang

Krisis lingkungan dalam beberapa tahun terakhir telah berkembang dari sekadar isu ekologis menjadi persoalan strategis yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan bisnis, stabilitas sosial, dan legitimasi institusional. Peristiwa banjir dan longsor besar yang terjadi di Sumatra, yang menimbulkan korban jiwa dalam jumlah signifikan, menjadi contoh konkret bagaimana eksploitasi sumber daya alam tanpa pengelolaan yang berkelanjutan dapat memicu bencana multidimensional. Dalam konteks ini, keputusan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk mencabut izin puluhan perusahaan sektor sumber daya alam bukan hanya langkah administratif, tetapi juga mencerminkan perubahan arah kebijakan strategis nasional.

Sektor sumber daya alam selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama melalui komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, dan mineral. Namun, model pertumbuhan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya (resource-extractive growth) telah menimbulkan konsekuensi serius berupa deforestasi, degradasi lingkungan, dan meningkatnya kerentanan terhadap bencana alam. Hal ini memunculkan dilema strategis antara pencapaian kinerja ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Dalam situasi tersebut, krisis lingkungan berfungsi sebagai *wake-up call* yang memaksa seluruh aktor—pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan investor—untuk mengevaluasi kembali paradigma pembangunan yang selama ini digunakan.

Dari perspektif manajemen strategis, krisis lingkungan dapat dipahami sebagai titik balik (*strategic inflection point*) yang mengubah aturan permainan dalam industri. Organisasi tidak lagi dapat mengandalkan keunggulan berbasis efisiensi atau eksploitasi sumber daya semata, tetapi harus mampu mengintegrasikan aspek keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik ke dalam strategi inti mereka. Dalam hal ini, konsep ESG

(Environmental, Social, Governance) muncul sebagai kerangka penting yang menghubungkan kinerja bisnis dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. ESG tidak hanya berfungsi sebagai alat kepatuhan (compliance), tetapi juga sebagai sumber keunggulan kompetitif dan legitimasi jangka panjang.

Selain itu, krisis lingkungan juga memicu dinamika legitimasi organisasi. Perusahaan yang sebelumnya beroperasi dengan legitimasi formal dari pemerintah kini dihadapkan pada tuntutan legitimasi sosial dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hilangnya kepercayaan publik akibat kerusakan lingkungan dapat berdampak pada reputasi, nilai perusahaan, hingga keberlangsungan operasional. Oleh karena itu, pemulihan legitimasi menjadi agenda strategis yang tidak dapat diabaikan, yang salah satunya dapat dilakukan melalui implementasi ESG secara substansial dan bukan sekadar simbolik.

Dalam konteks yang lebih luas, respons terhadap krisis lingkungan juga melibatkan interaksi multi-aktor yang kompleks. Pemerintah berperan sebagai regulator dan penegak hukum, perusahaan sebagai pelaku utama aktivitas ekonomi, masyarakat sebagai pihak yang terdampak, serta investor sebagai penggerak tekanan pasar terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Interaksi ini membentuk ekosistem tata kelola yang menentukan arah transformasi sektor sumber daya alam ke depan. Dengan demikian, analisis terhadap respons multi-aktor menjadi penting untuk memahami bagaimana perubahan strategis terjadi dan bagaimana konflik kepentingan dapat dikelola.

Lebih jauh lagi, dalam perspektif manajemen berbasis nilai, termasuk pendekatan syariah, krisis lingkungan mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara aktivitas ekonomi dan tanggung jawab moral. Prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), amanah, dan kemaslahatan menekankan bahwa aktivitas bisnis tidak boleh merugikan lingkungan maupun masyarakat. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai etika dan spiritual dalam strategi bisnis menjadi semakin relevan sebagai landasan untuk mencapai keberlanjutan yang holistik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana krisis lingkungan menjadi titik balik strategis dalam sektor sumber daya alam, dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) respons multi-aktor terhadap krisis, (2) dinamika legitimasi organisasi, dan (3) integrasi ESG sebagai kerangka strategis baru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan manajemen strategis berbasis keberlanjutan serta kontribusi praktis bagi pengambilan keputusan di sektor sumber daya alam.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif untuk memahami secara mendalam bagaimana krisis lingkungan menjadi titik balik strategis dalam sektor sumber daya alam. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang dikaji bersifat kompleks, kontekstual, dan melibatkan interaksi multi-aktor (pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan investor).

Studi kasus difokuskan pada peristiwa krisis lingkungan di Sumatra yang memicu kebijakan pencabutan izin perusahaan oleh pemerintah di bawah Prabowo Subianto. Kasus ini dipilih karena merepresentasikan fenomena nyata yang relevan dengan isu ESG, legitimasi, dan keberlanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretif yang bertujuan untuk memahami makna, persepsi, dan konstruksi sosial dari berbagai aktor terkait implementasi praktik keberlanjutan. Pendekatan ini dikombinasikan dengan multi-actor analysis untuk mengkaji interaksi antar pemangku kepentingan, serta embedded case study yang memungkinkan analisis mendalam terhadap sub-unit dalam satu kasus utama. Dengan demikian, penelitian ini mampu menangkap dinamika kompleks antara aktor dalam konteks industri berbasis sumber daya alam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan minimal empat informan yang mewakili aktor kunci, yaitu manajer perusahaan sektor sumber daya alam, akademisi atau peneliti di bidang manajemen atau lingkungan, aktivis lingkungan dari organisasi non-pemerintah (NGO), serta karyawan operasional di sektor tambang atau perkebunan. Informan dipilih secara purposive berdasarkan kriteria memiliki pengalaman langsung atau pengetahuan yang relevan, serta keterlibatan dalam isu lingkungan atau industri terkait. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan kebijakan pemerintah, publikasi ilmiah periode 2022–2026, laporan ESG

perusahaan, serta berita dan analisis industri yang relevan, yang berfungsi untuk memperkuat validitas temuan dan memberikan konteks makro.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka yang fleksibel untuk menggali informasi secara mendalam. Selain itu, dokumentasi dilakukan melalui analisis berbagai dokumen seperti laporan ESG, kebijakan pemerintah, dan dokumen perusahaan. Jika memungkinkan, observasi juga dilakukan untuk memahami praktik operasional serta interaksi antar stakeholder secara langsung.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *thematic analysis* yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu transkripsi hasil wawancara, proses coding (*open coding* dan *axial coding*), serta identifikasi tema-tema utama seperti respons multi-aktor, legitimasi, dan integrasi ESG. Selain itu, digunakan teknik *pattern matching* untuk membandingkan temuan empiris dengan kerangka teori yang relevan, seperti teori legitimasi, kerangka ESG, dan teori manajemen strategis. Untuk meningkatkan validitas, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan data primer dan sekunder sehingga dapat mengurangi potensi bias.

Validitas dan reliabilitas penelitian dijaga melalui beberapa strategi. Validitas internal dilakukan dengan triangulasi sumber data dan member checking, yaitu mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan. Validitas eksternal dicapai melalui generalisasi analitik dengan mengaitkan temuan pada konteks kasus serupa. Sementara itu, reliabilitas dijaga melalui dokumentasi proses penelitian secara sistematis serta penyusunan audit trail.

Penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan nilai-nilai syariah untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif. Indikator ESG meliputi dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, dan transparansi tata kelola, sedangkan pendekatan syariah mencakup prinsip 'adl (keadilan), amanah (tanggung jawab), dan maslahah (kemanfaatan). Integrasi ini memungkinkan evaluasi yang tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan, tetapi juga pada dimensi etika.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain fokus pada satu kasus utama di wilayah Sumatra, jumlah informan yang terbatas, serta ketergantungan pada persepsi subjektif responden. Meskipun demikian, penelitian ini tetap berupaya menjaga kualitas melalui pendekatan metodologis yang sistematis.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menjunjung tinggi etika penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan identitas responden, memperoleh persetujuan partisipasi (*informed consent*), serta memastikan bahwa seluruh data yang digunakan tidak dimanipulasi.

3. Hasil dan Diskusi

Peristiwa banjir dan longsor besar di Sumatra yang menewaskan lebih dari 1.000 jiwa tidak dapat dipahami semata sebagai bencana alam, melainkan sebagai akumulasi risiko dari praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Data investigatif pemerintah menunjukkan bahwa sekitar satu juta hektare area konsesi hutan dan perkebunan terafiliasi dengan perusahaan yang melanggar regulasi, sehingga mempercepat degradasi lingkungan. Dalam perspektif manajemen strategis, kondisi ini mencerminkan *strategic inflection point*, yaitu titik kritis ketika model bisnis berbasis eksploitasi tidak lagi layak, risiko eksternal meningkat signifikan, dan organisasi dipaksa melakukan transformasi. Kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari orientasi pertumbuhan menuju keberlanjutan.

3.1 Respons Multi-Aktor

Respons terhadap krisis ini menunjukkan dinamika yang kompleks antar aktor. Pemerintah mengambil langkah tegas melalui pencabutan izin usaha, pengajuan gugatan lingkungan sebesar Rp4,8 triliun, serta investigasi potensi pidana. Hal ini menandai pergeseran dari sekadar *regulatory compliance* menuju *regulatory enforcement*, sekaligus memperkuat legitimasi negara sebagai penjaga keberlanjutan, bukan hanya fasilitator investasi.

Di sisi lain, respons perusahaan terbagi ke dalam tiga pola utama, yaitu kooperatif, defensif, dan transformasional. Sebagian perusahaan menunjukkan sikap kooperatif dengan mendukung audit dan mulai menyesuaikan kebijakan ESG. Namun, sebagian lainnya bersikap defensif dengan menghindari tanggung jawab dan hanya menekankan kepatuhan formal. Hanya sebagian kecil perusahaan yang benar-benar melakukan transformasi dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis. Secara umum, perusahaan mengalami *legitimacy*

shock yang berdampak pada penurunan reputasi dan kepercayaan publik. Salah satu contoh yang menjadi sorotan global adalah operasi tambang emas Martabe oleh Agincourt Resources yang dikaitkan dengan Jardine Matheson, yang menghadapi kritik atas dampak lingkungan dan ancaman terhadap biodiversitas.

Masyarakat dan organisasi non-pemerintah (NGO) juga memainkan peran penting sebagai *pressure group* melalui advokasi, kampanye publik, dan tekanan terhadap regulator. Hasil wawancara menunjukkan bahwa bencana ini dipersepsikan sebagai hasil eksploitasi jangka panjang, bukan sekadar fenomena alam. Hal ini mencerminkan pergeseran peran masyarakat dari *passive stakeholder* menjadi aktor aktif dalam mendorong perubahan.

Dari sisi investor, terjadi perubahan preferensi yang signifikan, di mana modal global mulai menjauhi perusahaan dengan risiko ESG tinggi. Tren divestasi oleh berbagai lembaga investasi internasional menunjukkan bahwa ESG kini menjadi determinan utama dalam pengambilan keputusan investasi. Implikasinya, perusahaan yang gagal mengadopsi ESG berpotensi kehilangan akses terhadap sumber pendanaan.

3.2 Dinamika Legitimasi Organisasi

Krisis ini memunculkan *legitimacy gap*, yaitu kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan praktik perusahaan. Dampaknya adalah hilangnya *social license to operate* serta menurunnya tingkat kepercayaan publik. Dalam konteks ini, legitimasi tidak lagi bersifat simbolik, tetapi menjadi aset strategis yang menentukan keberlanjutan organisasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan reputasi lingkungan yang buruk menghadapi peningkatan risiko hukum dan penolakan sosial. Oleh karena itu, pemulihan legitimasi menuntut perubahan substantif melalui transparansi, akuntabilitas, dan implementasi ESG yang nyata, bukan sekadar praktik *greenwashing*.

3.3 Integrasi ESG sebagai Transformasi Strategis

Integrasi ESG dalam strategi perusahaan menjadi elemen kunci dalam merespons krisis. Dari perspektif manajemen risiko, ESG berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko lingkungan, mengurangi potensi bencana, serta mengelola hubungan sosial dengan pemangku kepentingan.

Selain itu, ESG juga memberikan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang mengadopsi ESG cenderung lebih dipercaya oleh investor, memiliki reputasi yang lebih baik, dan lebih resilien terhadap tekanan eksternal. Dalam sektor sumber daya alam yang memiliki karakteristik risiko lingkungan tinggi dan tekanan regulasi yang kuat, ESG bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis.

3.4 Analisis Berdasarkan Data Wawancara

Hasil wawancara memperkuat temuan empiris penelitian. Manajer perusahaan mengungkapkan bahwa tekanan target produksi sering kali mengesampingkan pertimbangan lingkungan, yang menunjukkan adanya konflik antara profitabilitas dan keberlanjutan. Akademisi menilai kondisi ini sebagai kegagalan *strategic foresight* dan lemahnya tata kelola. Sementara itu, aktivis lingkungan menyoroti bahwa kerusakan lingkungan merupakan akumulasi dari kebijakan yang permisif di masa lalu. Dari perspektif karyawan, muncul dilema antara kebutuhan ekonomi dan kesadaran terhadap dampak lingkungan, yang menunjukkan adanya dimensi sosial dalam krisis ini.

Temuan wawancara:

“Bencana ini bukan sekadar alam, tetapi hasil eksploitasi jangka panjang” (Aktivis lingkungan)

Hal ini menunjukkan:

Perubahan dari *passive stakeholder* → *active pressure group*

a. Investor: Perubahan Preferensi Modal

Tren global menunjukkan:

1. Investor mulai menarik diri dari perusahaan berisiko tinggi ESG
2. Contoh: divestasi oleh sovereign fund Norwegia

Implikasi:

1. ESG menjadi determinan utama investasi
2. Perusahaan tanpa ESG berisiko kehilangan akses modal.

b. Dinamika Legitimasi Organisasi

Terjadinya Legitimacy Gap

Krisis ini menciptakan kesenjangan antara:

1. Ekspektasi masyarakat
2. Praktik perusahaan

Dampak:

1. Hilangnya social license to operate
2. Penurunan trust

c. Legitimasi sebagai Aset Strategis

Legitimasi kini menjadi:

1. Sumber keberlanjutan
2. Faktor penentu kelangsungan bisnis

Temuan:

Perusahaan dengan reputasi buruk menghadapi:

1. Risiko hukum
2. Penolakan sosial

d. Mekanisme Pemulihan Legitimasi

Perusahaan harus:

1. Transparan
2. Akuntabel
3. Mengadopsi ESG secara nyata

Bukan sekadar greenwashing.

Integrasi ESG Sebagai Transformasi Strategis

A. ESG sebagai Risk Management Tool

Dimensi ESG membantu:

1. Mengidentifikasi risiko lingkungan
2. Mengurangi potensi bencana
3. Mengelola hubungan sosial

B. ESG sebagai Competitive Advantage

Perusahaan yang menerapkan ESG:

1. Lebih dipercaya investor
2. Memiliki reputasi lebih baik
3. Lebih resilient

C. ESG di Sektor Sumber Daya Alam

Karakteristik sektor:

1. High environmental risk
2. High regulatory pressure

ESG menjadi: bukan pilihan, tetapi keharusan strategis.

Analisis Berdasarkan Data Wawancara

Responden 1 (Manajer Perusahaan)

“Tekanan target produksi sering mengalahkan pertimbangan lingkungan.”

Menunjukkan konflik antara profit dan sustainability

Responden 2 (Akademisi)

“Ini adalah kegagalan strategic foresight dan governance.”

Menunjukkan lemahnya perencanaan jangka panjang

Responden 3 (Aktivis)

“Kerusakan lingkungan adalah akumulasi dari kebijakan yang permisif.”

Kritik terhadap sistem regulasi sebelumnya

Responden 4 (Karyawan)

“Kami berada di dilema antara pekerjaan dan dampak lingkungan.”

Menunjukkan dimensi sosial krisis.

3.2. Implikasi Praktis

Perusahaan harus:

1. Mengintegrasikan ESG dalam strategi inti
2. Mengembangkan sustainability governance
3. Melibatkan stakeholder secara aktif.

3.3. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memperkuat bahwa:

1. Krisis dapat menjadi pemicu inovasi strategis
2. ESG bukan sekadar alat pelaporan, tetapi kerangka strategi

3.4 Perspektif Syariah: Evaluasi Etis

Dari perspektif syariah, krisis ini mencerminkan beberapa pelanggaran prinsip dasar. Pertama, pelanggaran *amanah*, karena sumber daya alam tidak dikelola secara bertanggung jawab. Kedua, ketidakadilan ('*adl*'), di mana dampak negatif lebih banyak ditanggung oleh masyarakat. Ketiga, tidak tercapainya *maslahah*, karena keuntungan ekonomi tidak sebanding dengan kerugian sosial dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa model bisnis yang dijalankan belum sejalan dengan prinsip etika Islam.

3.5 Sintesis Strategis dan Implikasi

Secara keseluruhan, krisis ini menunjukkan hubungan kausal yang jelas, yaitu eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan menyebabkan degradasi lingkungan, yang kemudian memicu bencana, krisis legitimasi, intervensi regulasi, dan pada akhirnya mendorong transformasi strategi menuju integrasi ESG.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya perusahaan untuk mengintegrasikan ESG ke dalam strategi inti, membangun tata kelola keberlanjutan, serta melibatkan stakeholder secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa krisis dapat menjadi pemicu inovasi strategis dan bahwa ESG bukan sekadar alat pelaporan, melainkan kerangka strategis yang menentukan keberlanjutan organisasi.

Krisis lingkungan di sektor sumber daya alam tidak hanya mengungkap kelemahan sistem sebelumnya, tetapi juga membuka peluang transformasi menuju model bisnis yang lebih berkelanjutan. Respons multi-aktor, dinamika legitimasi, dan integrasi ESG menjadi faktor kunci dalam menentukan arah perubahan tersebut. Dalam perspektif strategis dan etis, keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar bagi kelangsungan organisasi di masa depan.

4. Kesimpulan

Krisis lingkungan yang terjadi di sektor sumber daya alam, khususnya yang tercermin dari bencana besar di Sumatra, telah membuktikan bahwa model pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya tanpa pengelolaan berkelanjutan tidak lagi dapat dipertahankan. Peristiwa tersebut bukan hanya menjadi tragedi ekologis dan kemanusiaan, tetapi juga berfungsi sebagai **titik balik strategis (strategic inflection point)** yang memaksa seluruh aktor untuk melakukan evaluasi mendasar terhadap paradigma bisnis dan tata kelola yang selama ini dijalankan. Hasil analisis menunjukkan bahwa krisis ini memicu respons yang kompleks dan saling terkait di antara berbagai aktor. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, mengambil langkah tegas melalui pencabutan izin usaha dan penguatan penegakan regulasi, yang menandakan pergeseran dari pendekatan fasilitatif menuju pendekatan pengawasan yang lebih ketat. Di sisi lain, perusahaan menghadapi tekanan besar untuk beradaptasi, baik melalui perubahan strategi maupun peningkatan transparansi, meskipun respons yang muncul masih beragam antara adaptif, defensif, hingga transformasional. Masyarakat dan organisasi sipil turut memainkan peran penting dalam meningkatkan tekanan sosial dan moral, sementara investor global mulai menjadikan kriteria keberlanjutan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Dari perspektif legitimasi, krisis ini mengungkap adanya kesenjangan yang signifikan antara praktik bisnis perusahaan dan ekspektasi sosial. Hilangnya kepercayaan publik menunjukkan bahwa legitimasi tidak lagi bersifat statis, melainkan harus terus dijaga melalui tindakan nyata yang sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan. Dalam konteks ini, legitimasi berkembang menjadi aset strategis yang menentukan keberlangsungan organisasi, bukan sekadar aspek reputasional. Lebih lanjut, integrasi ESG (Environmental, Social, Governance) terbukti menjadi kerangka strategis yang krusial dalam menjawab tantangan tersebut. ESG tidak hanya berfungsi sebagai alat mitigasi risiko, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun kembali kepercayaan, meningkatkan daya saing, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Perusahaan yang mampu menginternalisasi ESG ke dalam strategi inti akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan regulasi, tuntutan pasar, dan dinamika sosial. Dalam perspektif manajemen berbasis nilai, termasuk pendekatan syariah, krisis ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan ('*adl*'), amanah, dan kemaslahatan dalam aktivitas bisnis. Ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial-lingkungan yang terjadi sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan finansial yang tidak disertai dengan tanggung jawab moral akan menghasilkan konsekuensi sistemik yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu, integrasi nilai etika dan spiritual menjadi elemen penting dalam membangun strategi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis lingkungan bukan hanya ancaman, tetapi juga peluang transformasi strategis bagi sektor sumber daya alam.

Perubahan menuju model bisnis yang lebih bertanggung jawab memerlukan kolaborasi multi-aktor, penguatan legitimasi, serta implementasi ESG yang substantif. Dengan demikian, keberlanjutan tidak lagi menjadi pilihan tambahan, melainkan menjadi fondasi utama dalam merumuskan dan mengeksekusi strategi organisasi di masa depan.

Referensi

1. Asian Development Bank. (2023). *Asian Development Outlook 2023: Climate and Sustainability*. Manila: ADB.
2. Global Reporting Initiative. (2022). *GRI Standards for Sustainability Reporting*. Amsterdam: GRI.
3. Harvard Business Review. (2023). ESG and competitive advantage: The sustainability imperative. *Harvard Business Review*, 101(4), 62–71.
4. International Energy Agency. (2024). *World Energy Outlook 2024*. Paris: IEA.
5. International Finance Corporation. (2022). *ESG Integration in Emerging Markets*. Washington, DC: IFC.
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2024*. Jakarta: KLHK.
7. McKinsey & Company. (2023). *The ESG Premium: New Perspectives on Value Creation*. New York: McKinsey & Company.
8. Mongabay. (2026). Indonesia forest and mining permit revocations linked to environmental damage.
9. Norwegian Government Pension Fund Global. (2024). *Responsible Investment Report*. Oslo: Norges Bank Investment Management.
10. OECD. (2022). *ESG Investing and Climate Transition: Market Practices*. Paris: OECD Publishing.
11. Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)*. Jakarta: OJK.
12. Reuters. (2026). Indonesia revokes permits of resource companies after deadly floods.
13. Tempo. (2026). Pemerintah cabut izin perusahaan akibat pelanggaran lingkungan di Sumatra.
14. Thompson Arthur A., Strickland A J., & Gamble John E. (2023). *Crafting and Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage*. New York: McGraw-Hill.
15. United Nations Development Programme. (2024). *Human Development Report 2024: Sustainability and Equity*. New York: UNDP.
16. United Nations Environment Programme. (2023). *Emissions Gap Report 2023: Broken Record*. Nairobi: UNEP.
17. World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Boosting Resilience and Sustainability*. Washington, DC: World Bank